

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Laba

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Laba

Laba menurut Kasmir (2017:302) adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Perusahaan yang memiliki laba yang relatif stabil memungkinkan untuk memprediksi besarnya estimasi laba di masa yang akan datang. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai.”

Menurut Hanafi (2015:95) pengertian pertumbuhan laba adalah sebagai berikut:

"Pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba pertahun yang dinyatakan dalam persentase."

Sedangkan menurut Harahap (2015:310) pengertian pertumbuhan laba adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan laba adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding tahun sebelumnya.”

Berdasarkan pengertian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa pertumbuhan laba merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik, jika kondisi ekonomi baik maka pertumbuhan perusahaan secara umum juga baik. Karena laba merupakan tolak ukur kinerja suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba perusahaan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut, dengan demikian investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Pertumbuhan Laba

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Indeks yang biasanya digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan.

Munawir (2014:234) menyatakan manfaat pertumbuhan laba adalah sebagai berikut:

“Setelah diketahui sebab-sebab berubahnya laba kotor secara terperinci, management dapat mengambil tindakan seperlunya, misalnya dengan adanya penurunan unit/kwantitas yang terjual, maka bagian penjualan dapat diminta pertanggung jawabnya. Begitu pula bila harga pokok per satuan mengalami kenaikan, maka bagian produksi dapat diminta keterangannya, mungkin perubahan ini karena naiknya harga bahan, naiknya upah buruh atau mungkin karena adanya pemborosan-pemborosan atau kecurangan-kecurangan.”

Menurut Wild, John, dan Subramanyam (2017:374) tujuan pertumbuhan laba bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan adalah:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan kinerja operasi perusahaannya.
2. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu.
3. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
4. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
5. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
7. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Dalam meningkatkan laba ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba sehingga pertumbuhan laba tahunan dapat mengalami kenaikan atau penurunan.

Menurut Kasmir (2017:307) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba ada 3 yaitu:

1. Berubahnya Harga Jual
Artinya, berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Misalnya harga jual yang ditetapkan sebelumnya Rp. 100,00 per unit dinaikkan Rp. 110,00 per unit atau sebaliknya karena berbagai sebab harga jual justru diturunkan. Perubahan ini jelas akan berdampak terhadap perolehan dari nilai jual tersebut.
2. Berubahnya Jumlah Kuantitas (Volume) Barang Yang Dijual
Artinya, perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelum. Sama seperti harga jual perusahaan jumlah barang yang dijual, misalnya dari jumlah yang ditargetkan terjual 1.000 unit, namun hanya terjual 900 unit atau sebaliknya naik menjadi 1.100 unit jelas akan mengakibatkan perubahan perolehan dari nilai jual tersebut.
3. Berubahnya Harga Pokok Penjualan
Maksudnya perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelum. Perubahan ini mungkin disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok penjualan dari sumber utamanya, misalnya kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya.

Sedangkan menurut Jumingan (2018:165) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba adalah sebagai berikut :

1. Naik Turunnya Jumlah Unit yang Dijual dan Harga Jual Per Unit.
2. Naik turunnya harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit.
3. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan.
4. Naik turunnya pos penghasilan atau biaya non operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan perubahan kebijaksanaan dalam pemberian atau penerimaan *discount*.
5. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak.
6. Adanya perubahan dalam metode akuntansi.

2.1.1.4 Pengukuran Pertumbuhan Laba

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan laba yaitu rasio pertumbuhan yang artinya menggambarkan persentase pertumbuhan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih tahun lalu.

Menurut Harahap (2015:310) pertumbuhan laba dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan laba.

Y_t : Laba setelah pajak periode tertentu.

Y_{t-1} : Laba setelah pajak pada periode sebelumnya.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor untuk memulihkan investasinya. Sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) dan IMF, Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang salah satunya adalah menyusun jadwal perbaikan manajemen perusahaan Indonesia.

Pengertian *Corporate Governance* menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2012) adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku.”

Agoes & Ardana (2013) menjelaskan bahwa *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Effendi (2016:11), pengertian tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut :

“Tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk

memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.”

Berdasarkan pengertian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa tata kelola perusahaan mencakup beberapa hak, seperti perlindungan hak pemegang saham, perlakuan adil, peran pemegang saham di perusahaan, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Diharapkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat dipastikan sumber daya perusahaan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

2.1.2.2 Teori yang Melandasi *Good Corporate Governance*

Hamdani (2016:29) menyatakan bahwa:

“Teori *corporate governance* dapat diformulasikan dalam model-model *corporate governance* yang bersifat *mainstream* seperti *finance model (agency theory)*, *stewardship model (stewardship theory)*, *stakeholders model (stakeholders theory)* atau *political model (political theory)* serta *myopic market model*.”

Penjelasan masing-masing model adalah sebagai berikut:

a. *Finance Model (Agency Theory)*

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manager (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham.

b. *Stewardship Model (Stewardship Theory)*

Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori ini beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal.

c. *Stakeholders Model (Stakeholders Theory)*

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*Shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan, selanjutnya disebut tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

d. *Political Model (Political Theory)*

Political model menyatakan bahwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan, *privilege*, atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan *stakeholder* lainnya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis.

e. *Myopic Market Model*

Myopic market model menyatakan bahwa pasar dikatakan sudah efisien, apabila informasi yang tersedia sudah lengkap dan sempurna, serta tidak ada informasi yang tidak simetris sehingga kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya pada harga pasar.

f. Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Theory*)

Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan telah menjadi besar, sehingga mereka memanfaatkan pasar dalam menentukan alokasi sumber daya. Dengan demikian pasar itu sendiri yang mengkoordinasikan transaksi-transaksi.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016:20) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- “1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)”

Berikut uraian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku secara umum:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian, mematuhi peraturan perundang-undangan serta mematuhi peraturan perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. **Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing orang perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran.

2.1.2.4 Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan memiliki peran yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik dikalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* menurut *Indonesian institute for corporate governance* (IICG, 2012:40), dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain:

- “1. Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat nilai perusahaan”.

Uraian penjelasan manfaat *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan peminjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

4. Mengangkat nilai perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan kadang kala akan menelan

biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Manfaat penerapan *Good Corporate Governance* tentunya sangat penting bagi perusahaan, karena manfaatnya tidak hanya terbatas pada saat ini, namun dalam jangka panjang dapat mendukung tumbuh kembang perusahaan. Selain membantu meningkatkan citra perusahaan di mata investor, hal ini niscaya menjadi nilai tambah perusahaan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin kompetitif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha.

2.1.2.5 Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan dan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut Agoes & Ardana (2013) adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih mudah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Terdapat lima tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN menurut Peraturan Menteri BUMN Per-01/MBU/2011 yaitu:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.1.2.6 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.

Daniri (2014:8) menjelaskan bahwa:

“Mekanisme Good Corporate Governance merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.”

Menurut Puspitawati, Suryandari, dan Susandya (2019) mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Berupa *internal mechanism* seperti: komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif serta komite audit.
2. *External mechanism* seperti pengendalian oleh pasar, *level debt financing*, dan auditor eksternal.

Berdasarkan pembagian mekanisme pengendali corporate governance yang dibagi menjadi dua yaitu, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, *outside block holdings*, dan kegiatan *takeover*. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta *stakeholder* lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja tetapi juga komite-komite dibawahnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang.

Sedangkan menurut Sutedi (2012:37) mekanisme eksternal dan internal *Good Corporate Governance* meliputi:

- a. Mekanisme Eksternal
Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.
- b. Mekanisme Internal
Mekanisme internal terdiri dari:
 1. Kepemilikan Manajerial.
 2. Kepemilikan Institusional.
 3. Dewan Komisaris.
 4. Komite audit.

2.1.2.6.1 Kepemilikan Manajerial

2.1.2.6.1.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Marcus, Kane dan Bodie (2018:8) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.”

Menurut Kusanti (2015) pengertian kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial adalah mekanisme Corporate Governance utama yang membantu masalah keagenan (agency conflict). Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Kepemilikan manajerial diukur dari presentase tingkat kepemilikan dewan direksi dan dewan komisaris.”

Sedangkan Hamdani (2016:135) menjelaskan bahwa:

“Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya kepemilikan saham manajemen, maka akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah.”

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen yang mengelola perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki manajer dalam perusahaan membuat manajer menjalankan perusahaan sebagai pemilik perusahaan dan merangkap sebagai pengelola perusahaan. Sehingga perusahaan yang biasanya hanya diawasi oleh pemilik perusahaan ikut turun dalam mengelola perusahaan hingga membuat laporan keuangan sendiri.

2.1.2.6.1.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Marcus, Kane dan Bodie (2018:9) struktur kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Rumus diatas berfungsi mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan antara jumlah saham manajemen dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan.

2.1.2.6.2 Kepemilikan Institusional

2.1.2.6.2.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Marcus, Kane dan Bodie (2018:10) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham.”

Menurut Kusanti (2015) kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi masalah teori keagenan antara perusahaan dan manajer. Sehingga tidak menimbulkan *ageny cost* yang dapat menyebabkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau organisasi. Kepemilikan institusional termasuk faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan karena berfungsi dalam monitoring, fungsi monitoring yang dilakukan institusional membuat perusahaan lebih efisien dalam melakukan pengawasan oleh pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari kesalahan pemilihan strategi yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan.

2.1.2.6.2.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Marcus, Kane dan Bodie (2018:11) struktur kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan institusional dengan membandingkan antara jumlah saham kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan Bapepam VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan.

2.1.2.6.3 Dewan Komisaris

2.1.2.6.3.1 Pengertian Dewan Komisaris

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menjelaskan pengertian dewan komisaris sebagai berikut:

“Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.”

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 pengertian dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan keseluruhan anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang fungsinya memberikan arahan kepada direksi untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.2.6.3.2 Pengukuran Dewan Komisaris

Menurut Puspitowati & Mulya (2014) ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

2.1.2.6.4 Komite Audit

2.1.2.6.4.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Puspitowati & Mulya (2014) komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal dan salah satu elemen kunci dalam struktur *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen.

Arens (2015:97) menjelaskan bahwa:

“Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2014 pengertian komite audit adalah:

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi untuk membantu dewan komisaris menjalankan tugas dalam penelitian laporan keuangan dan tanggung jawab pengawasan dalam perusahaan.”

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa komite audit merupakan orang yang bertugas membantu, mengendalikan, dan mengawasi manajemen dalam mengelola sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik.

2.1.2.6.4.2 Pengukuran Komite Audit

Menurut Puspitowati & Mulya (2014) komite audit diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

Rumus diatas berfungsi untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK N0.IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite Audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Independensi

Dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka penggunaan laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel.

Menurut Rahayu & Ely (2010:40) independensi adalah sebagai berikut :

“Independen artinya tidak mudah di pengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.”

Arens (2015:74) meyakini bahwa:

”Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa Independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau oleh akuntan publik. Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tidak independen, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.

2.1.3.2 Ancaman-Ancaman Terhadap Independensi

Auditor tidak hanya berkewajiban memperhatikan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya.

Menurut Arens (2015:75) ada 5 (lima) faktor yang mengancam independensi, yaitu:

1. Kepemilikan finansial yang signifikan
2. Pemberian jasa non-audit kepada klien
3. Imbalan jasa audit
4. Tindakan hukum antara KAP dan klien
5. Pergantian auditor

Adapun penjelasan dari ancaman-ancaman independensi menurut Arens tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Finansial yang Signifikan

Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misalnya pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi). Tidak ada yang dapat menerima atau mempertahankan sebuah perusahaan sebagai klien audit jika ada seseorang yang kenyataannya memiliki proporsi kepemilikan yang signifikan di perusahaan tersebut. Antisipasi terhadap kepemilikan langsung maupun tidak langsung yang besarnya signifikan di perusahaan klien dapat berdampak luas pada operasi auditor.

2. Pemberian Jasa Non-audit kepada Klien

Baik manajemen maupun perwakilan dari manajemen sering kali berkonsultasi dengan akuntan lainnya dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Meskipun konsultasi dengan akuntan lainnya merupakan praktik yang umum, namun hal ini dapat mengakibatkan hilangnya independensi dalam kondisi tertentu.

3. Imbalan Jasa Audit

Cara auditor untuk berkomunikasi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensinya auditnya.

4. Tindakan Hukum antara KAP dan Klien

ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan klien auditnya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit.

5. Pergantian Auditor

Riset di bidang auditing mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, opinion shopping dan mengurangi biaya. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terdapat ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian ini adalah komunikasi. Setelah mendiskusikan kebutuhan komunikasi di antara auditor, kita akan mendiskusikan secara singkat dampak dari opinion shopping dan pengurangan biaya.

Agoes & Ardana (2013) menyatakan ancaman terhadap independensi dapat berbentuk :

1. Kepentingan Diri

Kepentingan Diri (Self-Interest) Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik (namun tidak terbatas pada hal- hal berikut), antara lain:

- i. Kepentingan keuangan, pinjaman dan garansi
- ii. Perjanjian kompensasi insentif
- iii. Penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat
- iv. Tekanan komersial dari pihak diluar perusahaan (IFAC, 300.8)

2. Review Diri

Ancaman review diri dapat timbul jika pertimbangan sebelumnya di evaluasi ulang oleh akuntan profesional yang sama telah melakukan penilaiannya sebelumnya. Contoh ancaman review diri untuk akuntan publik antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang
- b. Terlibat dalam pembelian jasa pencatatan akuntansi sebelum perikatan pinjaman
- c. Menjadi anggota firm penjaminan setelah baru saja menjadi karyawan atau penjabat di perusahaan klien yang memiliki pengaruh langsung berkaitan dengan perikatan penjaminan tersebut
- d. Memberi jasa kepada klien yang berpengaruh langsung pada materi perikatan penjaminan tersebut. (IFAC,200.5)

3. Kekerabatan

Ancaman kekerabatan timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan professional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut, contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Anggaran tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien.
- b. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan.
- c. Mantan rekan (partner) dari kantor akuntan yang menjadi direktur atau penjabat klien atas karyawan pada posisi yang berpengaruh atas pokok suatu penugasan.
- d. Menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, kecuali nilainya tidak signifikan.
- e. Hubungan yang terjalin lama dengan karyawan senior perusahaan klien (IFC,200.7)

4. Intimidasi

Ancaman intimidasi dapat timbul jika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Contoh ancaman intimidasi untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Diancam, dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien.
- b. Ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi fee (IFC,200.8)

2.1.3.3 Upaya Memelihara Independensi

Menurut Rahayu & Ely (2010) dibutuhkan upaya pemeliharaan independensi. Hal-hal tersebut antara lain :

1. Kewajiban Hukum

Adanya sanksi hukum bagi auditor yang tidak independen.

2. Standar Auditing yang berlaku umum

Sebagai pedoman yang mengharuskan auditor mempertahankan sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan.

3. Standar Pengendalian Mutu

Salah satu standar pengendalian suatu mensyaratkan kantor akuntan publik menetapkan kebijakan dan prosedur guna memberikan jaminan yang cukup bahwa semua staf independen.

4. Komite Audit

Merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen

5. Komunikasi dengan Auditor Terdahulu

Auditor pengganti melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum penerima penugasan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai integritas manajemen.

6. Penjajagan Pendapat Mengenai Penarapan Prinsip Akuntansi

Tujuan untuk meminimalisir kemungkinan manajemen menjalankan praktik membeli pendapat, hal ini merupakan ancaman potensial terhadap independen.

2.1.3.4 Dimensi Independensi

Menurut Tuanakotta (2014:64) tiga dimensi dari independensi adalah sebagai berikut:

1. Independensi Program (*Programming Independence*) *Programming Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit.
2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*) *Investigative Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*) *Reporting Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ketiga dimensi independensi menurut Tuanakotta (2014:64), dikembangkan petunjuk yang mengidentifikasi apakah ada pelanggaran atas independensi:

1. Independensi Program Audit (*Programming Independence*)
 - a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*). Atau mengubah (*modify*) apapun dalam audit.
 - b. Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
 - c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu di lihat di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit.
2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)
 - a. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan, pegawai perusahaan, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajibannya, dan sumber-sumbernya.
 - b. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.

- c. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu evidential matter (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
 - d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan, atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
- a. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
 - b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
 - c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun tidak di dalam pernyataan fakta, opini, rekomendasi, dan dalam interpretasi.
 - d. Bebas dari upaya memveto judgement auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.

2.1.3.5 Pengukuran Independensi Auditor

Independensi menurut Arens, (2015:74) adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi dapat diukur menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif (misal: jenis kelamin, pekerjaan, ras, tingkat pendidikan, agama dan lain-lain). Variabel *dummy* hanya mempunyai 2 (dua) nilai yaitu 1 dan 0, serta diberi simbol D. *Dummy* memiliki nilai 1 (D=1) untuk salah satu kategori dan 0 (D=0) untuk kategori yang lain.

Dalam penelitian ini, angka 0 apabila perusahaan menggunakan auditor yang sama dalam jangka waktu 3 tahun, dan angka 1 apabila perusahaan mengganti auditornya kurang dari 3 tahun (Dewi, 2019).

2.1.4 Kualitas Laba

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laba

Menurut Novianti (2012) yang dimaksud dengan kualitas laba adalah sebagai berikut:

“Kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama. Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten.”

Sedangkan menurut Sadiah & Priyadi (2015), menjelaskan bahwa laba yang berkualitas adalah sebagai berikut:

“Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) dimasa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.”

Dari penjelasan di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa kualitas laba merupakan informasi penting yang dapat digunakan oleh publik dan dapat digunakan oleh investor untuk menilai perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya sehingga tingginya kualitas laba yang dimiliki oleh perusahaan dapat membuat keputusan yang diambil oleh investor adalah tepat.

2.1.4.2 Karakteristik Laba Yang Berkualitas

Menurut Fauzi (2015), laba yang berkualitas mempunyai sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian di dalamnya. Selain itu, laba dikatakan berkualitas jika laba dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Menurut Silfi (2016) laba yang berkualitas merupakan laba yang memiliki

3 karakteristik berikut ini :

1. Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat
2. Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan, dan
3. Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan

2.1.4.3 Pengukuran Kualitas Laba

Menurut Adriani & Syafruddin (2011) konstruk kualitas laba dan pengukurannya berdasarkan cara menentukan kualitas laba, yaitu dikelompokkan berdasarkan :

1. Sifat runtun-waktu dari laba
2. Hubungan laba-kas-akrual
3. Karakteristik kualitatif dalam kerangka konseptual
4. keputusan implementasi.

Empat kelompok penentuan kualitas laba ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Kualitas laba berdasarkan sifat runtun-waktu laba, kualitas laba meliputi: persistensi, prediktabilitas (kemampuan prediksi), dan variabilitas. Atas dasar persistensi, laba yang berkualitas adalah laba yang persistensi yaitu laba yang berkelanjutan, lebih bersifat permanen dan tidak bersifat transitori. Persistensi sebagai kualitas laba ini ditentukan berdasarkan prespektif kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penilaian ekuitas. Kemampuan prediksi menunjukkan kapasitas laba dalam memprediksi butir informasi tertentu, misalnya laba di masa datang. Dalam hal ini, laba yang berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai

kemampuan tinggi dalam memprediksi laba di masa datang. Berdasarkan konstruk variabilitas, laba berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai variabilitas relatif rendah atau laba smooth.

2. Kualitas laba didasarkan pada hubungan laba-kas-akrual yang dapat diukur dengan berbagai ukuran, yaitu: rasio kas operasi dengan laba, perubahan akrual total, estimasi abnormal/*discretionary accruals* (akrual abnormal/kebijakan), dan estimasi hubungan akrual-kas. Dengan menggunakan ukuran rasio kas operasi dengan laba, kualitas laba ditunjukkan oleh kedekatan laba dengan aliran kas operasi. Laba yang semakin dekat dengan aliran kas operasi mengindikasikan laba yang semakin berkualitas. Dengan menggunakan ukuran perubahan akrual total, laba berkualitas adalah laba yang mempunyai perubahan akrual total kecil. Pengukuran ini mengasumsikan bahwa perubahan total akrual disebabkan oleh perubahan *discretionary accruals*. Estimasi *discretionary accruals* dapat diukur secara langsung untuk menentukan kualitas laba. Semakin kecil *discretionary accruals* semakin tinggi kualitas laba dan sebaliknya. Selanjutnya, keeratan hubungan antara akrual dan aliran kas juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba. Semakin erat hubungan antara akrual dan aliran kas, semakin tinggi kualitas laba.
3. Kualitas laba dapat didasarkan pada Konsep Kualitatif Kerangka Konseptual. Laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yaitu yang memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas/konsistensi. Pengukuran masing-masing

kriteria kualitas tersebut secara terpisah sulit atau tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penelitian empiris koefisien regresi harga dan return saham pada laba (dan ukuran-ukuran terkait yang lain misalnya aliran kas) diinterpretasi sebagai ukuran kualitas laba berdasarkan karakteristik relevansi dan reliabilitas.

4. Kualitas laba berdasarkan keputusan implementasi meliputi dua pendekatan. Dalam pendekatan pertama, kualitas laba berhubungan negatif dengan banyaknya pertimbangan, estimasi, dan prediksi yang diperlukan oleh penyusun laporan keuangan. Semakin banyak estimasi yang diperlukan oleh penyusunan laporan keuangan dalam mengimplementasi standar pelaporan, semakin rendah kualitas laba, dan sebaliknya. Dalam pendekatan kedua, kualitas laba berhubungan negatif dengan besarnya keuntungan yang diambil oleh manajemen dalam menggunakan pertimbangan agar menyimpang dari tujuan standar (manajemen laba). Manajemen laba yang semakin besar mengindikasikan kualitas laba yang semakin rendah dan sebaliknya.

Dalam penelitian ini kualitas laba diukur melalui *Discretionary Accruals* yang dihitung dengan cara mencari selisih antara *Total Accruals* (TAit) dan *Nondiscretionary Accruals* (NDAit). Jumlah akrual dalam perhitungan laba terdiri atas *Non Discretionary Accruals* (NDA) dan *Discretionary Accruals* (DA). Menurut Kothari (2010) *Discretionary Accruals* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

a) Menghitung *Total Accruals*

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i tahun t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i tahun t

CFO_{it} = Arus kas dari aktivitas operasi bersih perusahaan i tahun t

b) Menentukan Tingkat Akrual yang Normal

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\Delta REV_{it} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE}{A_{it-1}} \right) + \alpha_4 \left(\frac{ROA_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

Keterangan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i tahun t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada periode ke t-1

ΔREV_{it} = Perubahan *revenue* perusahaan i pada periode ke t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i pada periode ke t

ROA_{it} = *Return on asset* perusahaan i pada periode ke t

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ = Koefisien regresi

e = *error*

c) Menghitung *Nondiscretionary Accruals*

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\Delta REV_{it} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE}{A_{it-1}} \right) + \alpha_4 \left(\frac{ROA_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

Keterangan:

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i pada periode t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada periode ke t-1

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i pada periode ke t

e = *error*

d) Menghitung *Discretionary Accruals*

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} = *Discreataionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} = *Nondiscreataionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} = *Total Accruals* perusahaan i pada periode ke t

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Kualitas Laba antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lisa J. C. Polimpung (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Laba Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Goods dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)	Kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Dewan komisaris, kepemilikan istitusional, dan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
2	Nadila Al-Vionita dan Nur Fadjrih Asyik (2020)	Pengaruh Struktur Modal, <i>Investment Opportunity Set</i> (IOS), Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Kualitas Laba	Struktur modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. <i>Investment Opportunity Set</i> (IOS) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. Pertumbuhan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

3	Ni Wayan Juni Ayu Puspitawati, Ni Nyoman Ayu Suryandari, dan AA Putu Gde Bagus Arie Susandya (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Laba Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba	Pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
4	Tutik Arniati, Dyah Aruning Puspita, Aminul Amin, dan Kashan Pirzada (2019)	The Implementation Of Good Corporate Governance Model And Auditor Independence In Earnings' Quality Improvement	Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.
5	Augustpaosa Nariman dan Margarita Ekadjaja (2018)	Implikasi Corporate Governance, Investment Opportunity Set, Firm Size, Dan Leverage Terhadap Earnings Quality	Terdapat pengaruh yang signifikan antara institusional shareholding, board size dan board independence dengan earnings quality. Investment opportunity set dan firm size juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earnings quality. Adanya pengaruh namun tidak signifikan antara variabel leverage dengan earnings quality.

6	Redy Arisonda (2018)	Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Pertumbuhan Laba, Ukuran Perusahaan Dan Investment Opportunity Set (Ios) Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei	Struktur modal, likuiditas, dan pertumbuhan laba berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan pada kualitas laba perusahaan. Investment opportunity set berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba perusahaan.
7	Glory Septiyani, Elly Rasyid, dan Emerald G. Tobing (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba Pada Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015	Struktur modal secara parsial berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap kualitas laba. Pertumbuhan laba secara parsial tidak berpengaruh namun bersifat positif terhadap kualitas laba. Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan namun, memberikan arah yang positif terhadap kualitas laba perusahaan.
8	Kartika Aulia Zein (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Laba, Struktur Modal, Likuiditas Dan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba Dengan Komisaris Independen Dimoderasi Oleh Kompetensi Komisaris Independen	Pertumbuhan laba, Struktur modal, Likuiditas, dan Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa adanya moderasi dari kompetensi komisaris independen di bidang akuntansi atau keuangan terhadap hubungan antara komisaris independen dan discretionary accruals.

9	Alfiati Silfi (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Laba, Struktur Modal, Likuiditas Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Laba	Pertumbuhan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Struktur modal, Likuiditas, dan Komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba.
10	Nisfatun Aulia dan Ni Nyoman Alit Triani (2016)	Pengaruh Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan <i>Growth</i> Terhadap Manajemen Laba	Independensi auditor, kualitas audit, dan <i>growth</i> berpengaruh terhadap manajemen laba.
11	Halimatus Sadiah dan Maswar Patuh Priyadi (2015)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Size</i> , Pertumbuhan Laba Dan <i>Investment Opportunity Set</i> Terhadap Kualitas Laba	Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba dan memiliki koefisien negatif. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba namun koefisien positif. Ukuran perusahaan, pertumbuhan laba, dan <i>Investment opportunity set</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba dan memiliki koefisien positif.
12	Nela Indah Puspitowati dan Anissa Amalia Mulya (2014)	Pengaruh Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012)	Ukuran komite audit dan ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba. Ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Laba Terhadap Kualitas Laba

Apabila suatu perusahaan memiliki kesempatan untuk bertumbuh, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan labanya di masa mendatang dan sekaligus mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan laba yang berkualitas.

Dalam penelitian yang dilakukan Sadiah & Priyadi (2015) hasilnya adalah pertumbuhan laba berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Semakin tinggi pertumbuhan laba, maka akan semakin tinggi nilai *discretionary accruals* perusahaan, jadi laba yang dihasilkan mempunyai kualitas yang rendah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Puspitawati, Suryandari, dan Susandya (2019) dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisona (2018) dan Zein (2016) pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba, karena semakin besar pertumbuhan laba maka semakin tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh pada masa mendatang.

Dari hasil penelitian terdahulu maka sampai pada pemahaman penulis bahwa pertumbuhan laba berpengaruh terhadap kualitas laba. Karena perusahaan yang mengalami pertumbuhan laba tinggi akan mampu menyelesaikan proyeknya, sehingga peningkatan laba akan direspon positif oleh investor. Dan semakin bagus pertumbuhan laba suatu perusahaan, mengindikasikan bahwa semakin berkualitas laba yang dihasilkan.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Laba

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka manajemen akan cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Menurut Polimpung (2020) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negatif terhadap kualitas laba hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial sebuah perusahaan maka akan semakin menurun pula kualitas laba perusahaan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitowati & Mulya (2014) yaitu kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kualitas laba. Karena manajer masih mengandalkan memperoleh keuntungan dari perannya sebagai manajer perusahaan dibanding perannya sebagai pemegang saham. Presentase kepemilikan saham oleh manajer biasanya sedikit nilainya, semakin kecil presentase kepemilikan saham oleh manajer maka hak pengendalian perusahaan semakin kecil.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati, Suryandari, dan Susandya (2019) hasilnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan dana pensiun, perbankan dan lain-lain dalam jumlah besar. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan agar kinerja perusahaan dapat lebih optimal. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nariman & Ekadjaja (2018) hasilnya yaitu kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Tingginya kepemilikan institusional mengurangi manajemen laba dan menaikkan kualitas laba.

Menurut Puspitowati & Mulya (2014) kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif terhadap kualitas laba. Ini berarti jika kepemilikan institusional tinggi, maka kualitas laba akan semakin rendah, dan sebaliknya. Sedangkan menurut penelitian Polimpung (2020) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.2.4 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laba

Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

Sehingga manajemen dapat membuat laporan keuangan dengan kualitas laba yang memuaskan (Puspitowati & Mulya, 2014).

Menurut Nariman & Ekadjaja (2018) ukuran dewan berpengaruh terhadap kualitas laba. Ukuran dewan yang lebih kecil akan lebih efektif dalam membuat keputusan yang tepat waktu. Semakin banyak jumlah anggota dewan, maka akan semakin sulit untuk melakukan komunikasi dan koordinasi kerja dari masing-masing anggota.

Hal ini didukung oleh penelitian Arniati, Puspita, Amin, dan Pirzada (2019) yang hasilnya menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Polimpung (2020) dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.2.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba

Komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Jumlah komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* yang diasumsikan mampu mengurangi permasalahan keuangan dan masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan.

Menurut Polimpung (2020) komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Semakin baiknya komite audit yang terdapat di dalam sebuah perusahaan maka pengawasan terhadap pelaporan keuangan di dalam perusahaan akan semakin baik pula dan mengurangi kemungkinan adanya kecurangan di dalamnya sehingga hal ini akan meningkatkan kualitas laba di dalam perusahaan.

Menurut Puspitawati, Suryandari, dan Susandya (2019) komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit lebih banyak diasumsikan memiliki laba yang berkualitas dibandingkan dengan perusahaan yang jumlah komite auditnya lebih sedikit. Sedangkan menurut Silfi (2016) komite audit memiliki hubungan negatif dengan kualitas laba. Semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan maka akan menurunkan kualitas laba.

Keberadaan komite audit dalam melakukan pengendalian internal perusahaan yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi beberapa tahun kedepan. Adanya pengaruh komite audit dengan kualitas laba diharapkan meminimalisir kesempatan manipulasi laba yang dapat mempengaruhi kualitas laba lewat peran komite audit sebagai pengawas laporan keuangan dalam operasional perusahaan.

2.2.6 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Laba

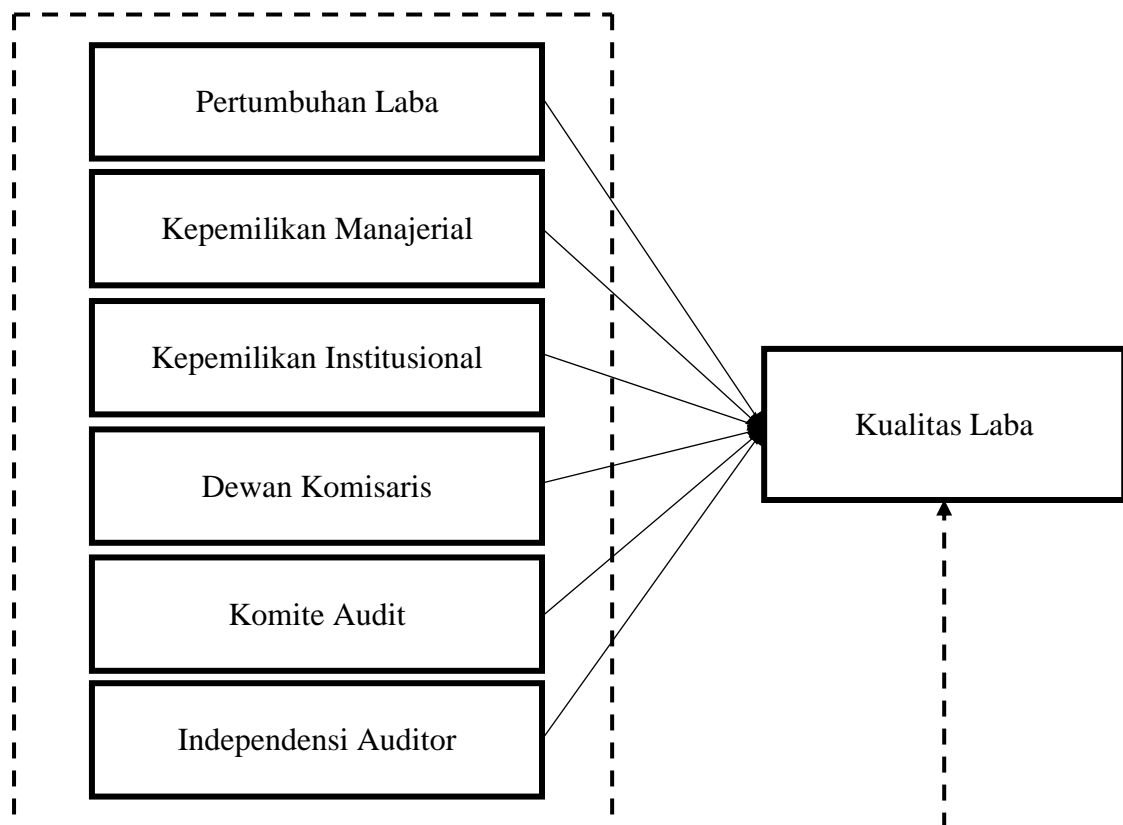
Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau simpulan.

Menurut Aulia & Triani (2019) independensi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba. Sikap mental independen yang dimiliki seorang auditor mampu untuk mengungkapkan laporan keuangan yang sebenarnya atas laporan yang telah dibuat oleh pihak manajemen.

Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Keterlibatan auditor dapat mengurangi asimetri informasi dan potensi benturan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pengguna informasi keuangan. (Arniati et al., 2019).

Auditor juga diharuskan oleh standar audit untuk mendiskusikan dan mengkomunikasikan kualitas laba yang diinginkan dengan komite audit, dan dengan kegiatan tersebut akan mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba oportunistik dan juga risiko kesalahan penyajian material.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Terdapat pengaruh Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba.
- H2 : Terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Laba.
- H3 : Terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba.
- H4 : Terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laba.
- H5 : Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba.
- H6 : Terdapat pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Laba.
- H7 : Terdapat pengaruh Pertumbuhan Laba, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Laba.